

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen aset merupakan salah satu topik yang menarik dibicarakan khususnya di Indonesia. Setiap organisasi swasta maupun organisasi pemerintah tentunya memiliki aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Setiap asset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga asset tersebut dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun publik.

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan nomor 7 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat dipeoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset disini dapat diartikan sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan

lain yang sah, yang dimiliki/dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber - sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah melalui sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah melakukan kebijakan pengelolaan aset. Untuk itu, kewenangan dibidang keuangan daerah yang ada pada pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara baik, dan diharapkan akan terjadi *value creation* dan bukan sebaliknya terjadi *value degradation*

Menurut Permendagri nomor 17 tahun 2007, asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini juga dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperluka untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber data yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Asset pemerintah dikategorikkan ke dalam asset lancar dan non lancar. Asset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Adapun asset non lancar dikategorika sebagai investasi jangka, asset tetap dan asset lainnya.

Menurut Siregar (2004: 518- 519) ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi

aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Di mana jika kelima tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel dan transparan.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah daerah dan juga badan usaha milik daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, sebagai salah satu badan usaha milik daerah, maka Badan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPAD) Nusa Tenggara Timur dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunan dan pengembangannya. Oleh karena itu, manajemen BPAD NTT harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasilguna serta mampu melakukan optimalisasi dari aset-aset yang ada.

Pengelolaan aset daerah secara khusus diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah.

Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan pengolahan terhadap asset milik pemerintah daerah dengan cara melakukan langkah strategis untuk melakukan optimalisasi asset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidakefisien asset yang idle milik pemerintah daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar. Kewenangan yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan aset.

Dalam pengelolaan asset, Kantor BPAD menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada). Akan tetapi penggunaan aplikasi ini belum sesuai dengan ketentuan, dikarenakan aplikasi milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini terdapat format yang belum disesuaikan.

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan dan mengoptimisasi asset di masa yang akan datang.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh manajemen asset terhadap optimalisasi asset tetap pada organisasi perangkat daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bless (2015), Hasanudin (2016),

mengatakan bahwa pengaruh manajemen asset terhadap optimalisasi tetap terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan asset tetap. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aronggear (2015) dan Umbora (2018) mengatakan bahwa pengaruh manajemen asset terhadap optimalisasi asset tetap tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi asset tetap.

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja Pelayan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah penerimaan pendapatan Asli Daerah	-	Besaran Pendapatan Asli Daerah	PAD	1,200 M	1,500 M	1,258 M	1,164 M	104,83	78
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	100%	100%	100%	100%	80%	100	80
3	Presentase penataan Aset SKPD Online dengan Sistem SIKPD Modul Aset	-	Badan dan 22 UPTD Pendapatan Daerah dan OPD	100%	60%	70%	60%	70%	100	100
4	Jumlah Tanah yang Disertifikasi Tiap Tahun	-	Jumlah Tanah yang Disertifikasi Tiap Tahun	Bidang Tanah	20 Bidang	35 Bidang	30 Bidang	9 Bidang	100	25,7
5	Presentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasi Aset Daerah	-	Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	100%	55%	60%	55%	55%	100	91,7
6	Meningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat	-	Persedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	100%	70%	80%	70%	20%	100	25
7	Jumlah Mobil Samsat Keliling	-	Jumlah Mobil Samsat Keliling	Unit	2 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit

Dalam Tabel Pencapaian Kinerja Pelayan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alasan tidak tercapainya target: - Persentase Realisasi Pencapaian Indikator Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya di Tahun 2020 yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target karena disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya Pandemi Covid 19 dan Flu Babi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat termasuk didalamnya Pembibitan dan Produksi Pakan Ternak.
 - Menyangkut tidak tercapainya Persentase Target indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan adanya Refokusing Anggaran sehingga beberapa item kegiatan belanja modal untuk mendukung pencapaian target tersebut tidak tercapai seperti penyediaan mesin survey Kepuasan dll;
 - Tidak tercapainya target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah disebabkan antara lain keterbatasan Personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan sertifikasi tanah masyarakat disamping itu Pandemi Covid 19 juga menyebabkan proses sertifikasi terhambat;
 - Tidak tercapainya Target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah karena Mitra Kerjasama Pemanfaatan Aset baik dalam bentuk Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan aset Pemerintah dalam perjalanannya mitra tersebut menunda rencana sebagai akibat Pandemi Covid 19;

- Menyangkut rendahnya Persentase Pemenuhan Sarana dan sarana pelayananan pada UPTD dan Pengadaan Mobil SAMSAT keliling karena adanya Refokusing Anggaran Khususnya belanja Modal Sarpras Pada Kantor UPTD.

2. Strategi:

- Terhadap besaran Target PAD yang akan dilakukan adalah melakukan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya membayar Pajak; Operasi Tilang Pajak Kendaraan Rencana Startegis (RENSTRA) Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT TAHUN 2019-2023 21 Bermotor, Melakukan Penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax amnesty, Mencari Obyek-obyek retribusi yang baru. - Menyangkut indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak akan dilakukan pemenuhan item-item untuk mendukung tingkat Kepuasan masyarakat.
- Terhadap target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah akan dibentuk Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota.
- Terhadap besaran Target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah, lokasi yang telah siap digunakan akan dilakukan promosi melalui media cetak dan untuk mitra yang telah mengajukan permohonan namun menunda akibat Pandemi Covid-19 maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dan renegoisasi Kembali;

- Sedangkan Persentase Pemenuhan Sarana dan sarana pelayananan pada UPTD dan Pengadaan Mobil SAMSAT keliling akan dialokasikan lagi anggaran.

Berdasarkan permasalahan penelitian dan peneliti terdahulu diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi Aset tetap. Untuk itu judul penelitian yang diajukan peneliti adalah “PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET TETAP DAERAH DI PROVINSI NTT”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Daerah di Provinsi NTT

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: apakah manajemen aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap daerah di Provinsi NTT

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap daerah di Provinsi NTT

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut ini:

1.5.1 Manfaat akademik

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang manajemen terutama mengenai optimalisasi aset di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur.

1.5.2 Manfaat Praktiks

a. Bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur

Dapat digunakan untuk menilai optimalisasi aset yang ada sehingga berguna sebagai bahan masukan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan untuk kelangsungan hidup perusahaan serta sebagai dasar efisien penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya

b. Bagi Penulis

Dapat digunakan untuk pengembangan wawasan dan pola pikir penelitian serta mengembangkan dan menerapkan ilmu yang di dapat di masa perkuliahan

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengantopik yang serupa dan dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis